

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau *International Relations* adalah praktik hubungan lintas batas negara antar bangsa yang sudah terjalin sejak ada interaksi antara aktor dan anggota masyarakat dengan yang lain. Saat ini, hubungan internasional menjadi keharusan bagi suatu negara dan bersifat sangat dinamis karena mengikuti perkembangan zaman. Interaksi dan praktik hubungan internasional yang semula sederhana kini semakin kompleks dan modern, seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Menurut Perwita & Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. (Perwita & Yani, 2005:48).

Beberapa pakar ahli telah mengemukakan definisi Hubungan Internasional. Seperti yang dikutip oleh Robert Jackson dan Sorensen dalam bukunya "Pengantar studi Hubungan Internasional", menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional adalah studi tentang hubungan dan interaksi antarnegara, yang mencakup aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional.” (Jackson & Sorensen, 2014:4).

Karen Mingst dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hubungan Internasional" juga menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub-nasional seperti pemerintah daerah dan individu.” (Wijatmadja, 2016:4-5)

Kedua definisi tersebut menyoroti tentang pola interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Hubungan Internasional selalu terkait dengan berbagai bentuk interaksi yang melintasi batas nasional atau yurisdiksi, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun antara negara-negara. Pola interaksi tersebut dapat

berupa kerja sama, persaingan, atau konflik yang terbentuk dari berbagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor baik itu dari kalangan pemerintah atau non-pemerintah, dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara.

Dalam studi internasional, terdapat tiga jenis interaksi yang menjadi fokus utama, yaitu interaksi antar negara, interaksi antara entitas non-negara atau transnasional yang melintasi batas-batas nasional, dan operasinya sistem secara keseluruhan, di mana negara dan masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem tersebut (Wijatmadja, 2016:5). Sehingga hal ini yang menjadikan studi hubungan internasional mempelajari beragam bidang seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (OI), organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO) organisasi non-pemerintah (NGO) dan perusahaan multinasional (MNC), hukum internasional, teori hubungan internasional dan lain sebagainya.

Maksud utama dari studi Hubungan Internasional adalah untuk memahami bagaimana fenomena internasional terjadi, termasuk perilaku negara dan non-negara di dalam sistem internasional. Fenomena tersebut mencakup perang, konflik, kerja sama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Konsekuensi dari hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi para pelakunya. Oleh karena itu, Hubungan Internasional dianggap sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut serta mengembangkan praktiknya.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kepentingan suatu negara dalam menjalin hubungan bilateral maupun multilateral. Istilah diplomasi sering kali dikaitkan dengan hubungan internasional, isu-isu global, hubungan luar negeri, metode komunikasi dan negosiasi dalam konteks hubungan luar negeri. Diplomasi merupakan proses politik yang bertujuan memelihara kebijakan luar negeri suatu negara dan mempengaruhi kebijakan serta sikap pemerintah negara lain.

Diplomasi merupakan hubungan yang dilakukan antar negara yang mempunyai tujuan untuk perdamaian dan dilakukan oleh agen resmi pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan diplomasi merupakan pengelolaan hubungan internasional antara negara yang ada didunia, yang termasuk negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan negara yang pada saat ini dikenal sebagai duta besar atau diplomat.

Dalam diplomasi, terdapat tiga fungsi utama yang meliputi perwakilan, negosiasi, dan pelaporan. Fungsi pertama adalah perwakilan, di mana diplomat bertindak sebagai perwakilan negara dalam bentuk perwakilan substantif dan perwakilan simbolik. Fungsi kedua adalah negosiasi, yang melibatkan proses mengajukan proposal yang eksplisit dengan alasan tertentu untuk mencapai kesepakatan dalam pertukaran atau kesadaran akan kepentingan bersama, terutama saat terdapat konflik kepentingan. Fungsi ketiga adalah pelaporan, yang melibatkan pengumpulan informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada pembuat keputusan negara. Aktivitas ini menjadi peran utama diplomat dan misi diplomatik di luar negeri.

Menurut Shoelhi Mohammad dalam bukunya yang berjudul “DIPLOMASI: Praktek Komunikasi Internasional”, ada berbagai ragam diplomasi, yaitu :

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*).
- b. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada

negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.

- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g. Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomasi*), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

Dalam konteks diplomasi, keberhasilan negosiasi sangat penting. Untuk itu, diperlukan individu-individu yang memiliki keahlian dan kecerdasan dalam melakukan negosiasi. Selain negosiasi,

terdapat berbagai cara dan strategi lain yang dapat digunakan untuk mencapai diplomasi yang efektif. Sebagai contoh, sebuah negara dapat melakukan perundingan, menandatangani perjanjian, dan mengimplementasikan langkah-langkah lainnya. Diplomasi dapat dilakukan secara bilateral antara dua negara atau melalui diplomasi multilateral yang melibatkan beberapa negara dalam proses negosiasi dan perundingan tersebut.

Diplomasi bukan hanya bisa dijalankan oleh aktor negara saja, akan tetapi juga peran aktor non-negara juga penting dalam hubungan internasional, aktor non-negara seperti Non-Governmental Organizations (NGOs), Inter-Governmental Organization (IGOs), individu, Multinational, dan Corporations. Dalam diplomasi ada empat aspek yang berkaitan. Aspek yang pertama adalah Komunikasi atau dialog. Pada diplomasi yang paling utama adalah melakukan komunikasi dengan negara lain. Aspek kedua adalah pengakuan. Aspek yang ketiga adalah kepentingan nasional. Aspek keempat yaitu proses negosiasi internasional. (Rijal, Najamuddin Khairur 2020)

2.1.3 Paradiplomasi

Dampak dari globalisasi sangat memengaruhi diplomasi di dunia internasional, dan menciptakan peluang interaksi yang lebih luas antara

aktor-aktor di seluruh dunia. Globalisasi juga memunculkan aktor-aktor baru, termasuk aktor non-negara dan sub-negara, yang memperluas peluang interaksi antar aktor dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, aktivitas yang dilakukan oleh aktor sub-negara dikenal dengan istilah paradiplomasi. Paradiplomasi sendiri merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an yang berasal dari kata *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy*, dan merujuk pada kebijakan luar negeri pemerintah non-pusat (David Criekemans:2008).

Istilah paradiplomasi digunakan untuk merujuk pada fenomena baru yang melibatkan entitas subnasional dalam hubungan internasional. Biasanya, paradiplomasi merujuk pada keterlibatan unit konstituen atau wilayah di dalam negara dalam urusan internasional. Beberapa ahli melihat paradiplomasi sebagai kegiatan internasional langsung oleh aktor subnasional yang mendukung, melengkapi, memperbaiki, menduplikasi, atau menantang diplomasi negara-bangsa. Takdir Ali Mukti menyatakan bahwa paradiplomasi merujuk pada perilaku dan kapasitas entitas "sub-state" untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. (Mukti, 2013).

Dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*,

Alexander S. Kuznetsov memberikan definisi paradiplomasi sebagai bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, budaya, politik, atau jenis manfaat lainnya. Secara esensial, paradiplomasi adalah tindakan independen yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah asing.

Ivo Duchacek, yang mengembangkan konsep paradiplomasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Panavotis Soldatos, telah membagi paradiplomasi menjadi tiga jenis. Hal ini menjadi pendekatan yang sering digunakan dalam menjelaskan masalah hubungan internasional yang melibatkan aktor subnasional, yaitu :

1. *Transborder regional paradiplomacy*, yaitu Paradiplomasi ini mengacu pada aktivitas hubungan antar aktor sub-negara yang biasanya memiliki kedekatan wilayah geografis, baik dalam bentuk hubungan formal maupun informal.
2. *Transregional paradiplomacy*, yaitu terjadi ketika adanya diplomasi dilakukan oleh antar aktor sub-negara yang wilayahnya tidak berbatasan secara langsung, namun masih berada di kawasan yang sama.
3. *Global paradiplomacy*, yaitu melakukan hubungan diplomasi yang dilakukan oleh antar aktor sub-negara dimana kedua aktor tidak berada dalam satu kawasan yang sama, dalam hal ini berbeda benua.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya yang mendukung pembangunan di setiap daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan tetap mengikuti konstitusi negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagai hasilnya, pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam hubungan transnasional dan mempengaruhi perkembangan model hubungan tersebut. (Jatmika, 2001:54)

Pemerintah sub-negara yang melakukan paradiplomasi memiliki fokus yang berbeda-beda. Tidak semua pemerintah daerah melaksanakan aktivitas hubungan internasional dengan cara yang sama karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan pendekatan yang unik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut contoh kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah:

1. Pembentukan *Sister City*
2. FDI (*Foreign Direct Investment*)
3. Pembentukan proyek bersama
4. Pengiriman delegasi

Berdasarkan aktivitas paradiplomasi tersebut, Andre Lecours di dalam tulisannya *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons From The*

Developed World dia memperkenalkan sebuah konsep *layers of paradiplomacy* yang membagi menjadi tiga lapisan paradiplomasi yang dapat kita gunakan untuk membedakan paradiplomasi satu dengan yang lain.

Andre Lecours membagi paradiplomasi menjadi tiga lapisan, di mana yang pertama adalah fokus pada tujuan ekonomi semata seperti ekspansi pasar dan pengembangan investasi internasional secara timbal balik. Hubungan ini tidak melibatkan motif politik atau budaya yang lebih kompleks.

Lapisan kedua lebih luas dan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai bidang kerjasama, tidak hanya terfokus pada keuntungan ekonomi semata. Jenis paradiplomasi ini meliputi bidang-bidang seperti kebudayaan, pendidikan, kesehatan, alih teknologi, dan lain-lain. Model kerjasama ini mengacu pada pola kerjasama luar negeri yang terdesentralisasi atau disebut juga '*decentralized cooperation*'.

Lapisan ketiga paradiplomasi merupakan bentuk yang lebih kompleks karena melibatkan motif politik dan identitas nasional wilayah yang spesifik. Pemerintah daerah yang terlibat dalam lapisan ini berupaya untuk menjalin hubungan internasional dan interaksi transnasional dengan semangat yang besar untuk mengekspresikan

identitas nasional wilayah mereka yang spesifik dan otonom yang berbeda dengan wilayah lain di negara mereka. Lapisan ini mencakup aspek-aspek yang lebih kompleks daripada lapisan sebelumnya dan melibatkan berbagai faktor seperti politik, budaya, dan identitas nasional.

Ketiga lapisan paradiplomasi yang diperkenalkan oleh Andre Lecours bersifat saling melengkapi karena hampir semua negara maju mengutamakan aspek ekonomi dalam hubungan internasional. Namun, banyak pemerintah daerah yang menambahkan elemen kerja sama dan mulai memasuki lapisan kedua dengan membuat kerja sama yang lebih luas dan ada beberapa yang memilih untuk masuk pada lapisan ketiga yang lebih politis dan berfokus pada identitas nasional wilayah yang spesifik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi memiliki banyak fungsi. Pemerintah daerah dapat memilih untuk menjalin hubungan luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi mereka juga dapat menambahkan lapisan lain terkait dengan kepentingan dan/atau identitas. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang berkembang, pendekatan yang komprehensif dalam paradiplomasi perlu dilakukan dengan memasukkan banyak tujuan yang berbeda.

Dilihat dari tiga kategori yang telah dijelaskan, paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam kategori kedua, di mana mereka dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak asing hampir selalu menggunakan nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang yang kompleks, seperti kerjasama ekonomi, pendidikan, kebudayaan atau kesenian, pertanian, kesehatan, alih teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, dan lain sebagainya. Maka dari itu Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Chungcheongnam-do Korea Selatan termasuk ke dalam lapisan kedua karena hubungan kerjasama kota ini memiliki *memorandum of understanding*.

2.1.4 Aktor Sub Negara dalam Hubungan Internasional

Aktor sub-negara dalam hubungan internasional merujuk pada kelompok atau entitas di bawah tingkat negara yang terlibat dalam kegiatan internasional. Beberapa ahli mengklasifikasikan aktor sub-negara sebagai "aktor non-negara" yang mencakup kelompok etnis, organisasi non-pemerintah, kota, provinsi, dan individu. Berikut adalah definisi menurut Ivo Duchacek mengenai aktor sub-negara dalam hubungan internasional, "aktor sub-negara adalah kelompok, organisasi,

atau wilayah yang terletak di bawah tingkat nasional yang memiliki kepentingan khusus dalam urusan internasional.”

Aktor sub negara dalam hubungan internasional seperti kelompok etnis, kota, dan individu, muncul dari lingkungan domestik suatu negara untuk mencapai tujuan mereka dengan melakukan aktivitas transnasional. Sementara itu, kota-kota di seluruh dunia dengan variasi bentuknya akan selalu berinteraksi dengan kota-kota lain di negara-negara lain. Beberapa kota besar tertentu menjadi pusat penting yang menghubungkan kota-kota dan benua-benua dengan jaringan komunikasi dan transportasi. Individu juga dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, pertama adalah aktor publik yang memegang kekuasaan atas sebuah institusi seperti negara dan menghadapi situasi yang menguntungkan atau membahayakan, contohnya Mikhail Gorbachev. Kelompok kedua adalah aktor swasta yang menjadi penting karena menjadi simbol perjuangan, seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, atau Mother Teresa (Henderson, 1998).

Terdapat empat aktor-aktor sub-negara yang kita bisa pelajari dalam studi HI, yaitu: organisasi internasional antar negara (*interstate organization*), organisasi nirlaba internasional (*international non-governmental organization*), perusahaan multinasional (*multinational corporation*), dan individu (*individuals*).

1. Organisasi internasional antar negara merupakan perkumpulan kerjasama antar negara dalam tataran baik regional/kawasan maupun global/internasional, di mana keanggotaannya umumnya terdiri dari pemerintah-pemerintah negara anggotanya. Dengan demikian, pada kerja dan forum yang dilangsungkan organisasi tersebut, anggota-anggotanya diwakili oleh pemerintahan negara tersebut, dengan mengatasnamakan seluruh negara tersebut.

Dalam perkembangannya, penyebutan organisasi internasional antar pemerintah mulai disaingi dengan organisasi antar negara, karena terdapat berbagai organisasi bertaraf internasional di mana keanggotaannya mewakili negara-negara tapi tidak diwakili secara langsung atau menyeluruh atau oleh pemerintahnya. Dengan demikian, kini terkenal adanya organisasi-organisasi dengan keanggotaan 'ekonomi' (*member economies*), atau bahkan keanggotaan 'federasi nasional' (*national federations*) khususnya untuk organisasi-organisasi sejenis di bidang olahraga.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*international non-governmental organization*), atau seringkali disebut juga organisasi nirlaba internasional, merupakan organisasi yang didirikan oleh pihak swasta atau non-negara dan bergerak melintasi batas negara. Pada umumnya, organisasi internasional non-pemerintah bergerak dalam suatu isu yang sangat spesifik, dan mengandalkan para relawan

(*volunteers*) dalam karya sehari-harinya. Organisasi-organisasi semacam ini juga umumnya mendapatkan pendanaan atau modalnya dari usaha pihak swasta atau donasi. Meski organisasi semacam ini tidak dimungkinkan mengambil keputusan yang substansial melampaui ruang gerak organisasinya, seringkali mereka bertindak menjadi kelompok penekan (*pressure group*) untuk mendesak negara-negara melakukan sesuatu yang ada dalam jalur kepentingan mereka. Organisasi semacam ini pada umumnya beranggotakan individu-individu dan bukan negara.

3. Perusahaan Multinasional (*multinational corporations*) merupakan badan usaha yang bergerak dalam upaya mencari keuntungan (*profit-oriented*) yang ruang usahanya melintasi batas-batas negara. Kini, definisi ‘perusahaan multinasional’ bisa mencakup berbagai hal: misalnya perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dengan cabang di berbagai negara lain, perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dengan pabrik atau alat-alat produksi di negara lain, atau bahkan perusahaan dengan pasar luas di berbagai negara.

4. Individu. Individu merupakan aktor dengan cakupan paling kecil dalam studi HI. Umumnya, ketika berbicara soal ‘individu’ dalam studi HI, pembelajar HI tersebut lebih berfokus kepada beberapa jenis individu, yaitu misalnya pemimpin negara, tokoh masyarakat, tokoh kebudayaan atau spiritual, dan para sarjana. Tokoh-tokoh inilah yang paling banyak memengaruhi pola interaksi dalam hubungan internasional, terutama

jika dibandingkan dengan individu-individu yang tergolong awam atau tidak memiliki kepentingan (*importance*) secara khusus.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mengambil bagian dalam sistem pengambilan keputusan. Ini termasuk dalam upaya mereka untuk memanfaatkan hubungan saling ketergantungan di tingkat internasional melalui paradiplomasi. Pemerintah daerah, seperti provinsi, dapat berperan sebagai pelaku aktif dalam menjalin hubungan dengan pihak asing, mengambil keputusan terkait investasi, perdagangan internasional, dan kerja sama ekonomi, serta berpartisipasi dalam forum internasional (Primawanti, H. 2022). Oleh karena itu, sumber daya internal, seperti organ, lembaga, dan unit kerja di dalam pemerintah daerah, berperan dalam membantu merumuskan dan melaksanakan strategi paradiplomasi untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan pihak lain di tingkat internasional.

2.1.5 Ekonomi dalam Hubungan Internasional

Ekonomi dalam hubungan internasional mengacu pada studi tentang interaksi ekonomi antara negara-negara di dunia. Hal ini melibatkan analisis dan pemahaman tentang bagaimana negara-negara saling berinteraksi dalam hal perdagangan, investasi, keuangan, pertukaran teknologi, dan aliran sumber daya serta faktor produksi lainnya.

Dalam konteks ini, ekonomi menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan antar negara. Negara-negara menjalankan kebijakan ekonomi dan berusaha untuk melindungi kepentingan nasional mereka, sekaligus mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas. Negara-negara juga terlibat dalam organisasi internasional dan perjanjian perdagangan untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi dan menciptakan aturan yang mengatur hubungan ekonomi global.

Dalam hubungan internasional, isu-isu ekonomi meliputi perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar negara, kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan, kemiskinan, dan isu-isu terkait seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Selain itu, ekonomi juga berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara dan dapat menjadi sumber konflik maupun kerja sama antar negara.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mengadakan perdagangan baik interregional maupun internasional, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ilmu ekonomi internasional yang sering pula hanya kita sebut ekonomi internasional kiranya dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya.

Perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama ekonomi internasional, di mana negara-negara menukar barang, jasa, dan sumber daya dengan tujuan memenuhi kebutuhan domestik dan memanfaatkan keunggulan komparatif. Investasi asing langsung juga menjadi elemen penting, di mana negara-negara menarik modal dari luar untuk mendukung pembangunan ekonomi mereka.

Organisasi internasional seperti WTO dan kesepakatan perdagangan regional memainkan peran dalam membentuk aturan dan kerangka kerja perdagangan yang adil. Selain itu, kerjasama ekonomi regional dan globalisasi telah membuka pintu bagi aliran teknologi, informasi, dan ide-ide, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Ekonomi dalam hubungan internasional juga mencakup upaya bersama dalam mengatasi masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim.

Menurut Oxley Summary, pengertian ekonomi dalam hubungan internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya.

a. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa.

b. Dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara,

maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional (Nazzarudin, 2017) .

2.1.5.1 Investasi

Investasi adalah tindakan atau komitmen untuk menggunakan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Istilah investasi dapat mencakup berbagai jenis aktivitas. Contohnya, melakukan investasi dalam aset riil seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, serta dalam aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi. Aktivitas ini umum dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengembalian investasi mereka.

Investasi atau penanaman modal merujuk pada pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh investor atau perusahaan untuk memperoleh barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Investasi atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat atau total dalam perekonomian. Dengan melakukan investasi, para penanam modal berharap dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Sadono Sukirno, 1994:107)

Dalam hal statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu: investasi perusahaan swasta, pengeluaran untuk membangun tempat tinggal, perubahan dalam persediaan inventaris perusahaan, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pengusaha melakukan investasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi yang akan dilakukan di masa depan. Dengan mengalokasikan sumber daya pada alat-alat produksi ini, mereka berharap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mencapai hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang. Artinya, investasi yang dilakukan saat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Semakin cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang menjanjikan di masa depan, semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan pada saat ini (Gunawan, 2009).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian:

1. Investasi merupakan salah satu elemen yang membentuk pengeluaran agregat, oleh karena itu peningkatan investasi akan berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
2. Penambahan barang modal sebagai hasil dari investasi akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan, dan perkembangan ini akan mendorong peningkatan produksi nasional dan peluang kerja.
3. Investasi selalu disertai dengan kemajuan teknologi, dan kemajuan ini akan memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Sasana, 2008).

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya

permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

2.1.5.2 Bisnis dan Perdagangan

Bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang melibatkan produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Secara umum, bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu individu, komunitas, atau masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Dalam prosesnya, bisnis melibatkan pengelolaan sumber daya ekonomi, baik itu barang maupun jasa, dengan cara yang efektif dan efisien.

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau yang paling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dan dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Starub dan Artner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Jadi

bisnis diartikan menjadi suatu kesibukan dan aktivitas dalam pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau nilai tambah.

Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian dari perusahaan (produksi, pemasaran, dan personalia), yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang. Sumber daya ekonomi yang dikelola secara efektif dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis bertujuan, yaitu:

1. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, kounitas, maupun masyarakat.
2. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar dari pada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis.
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.
4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat (pemilik, pekerja, dll) (Madnasir dan Khoruddin. 2012).

Sedangkan perdagangan, perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekomonian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan

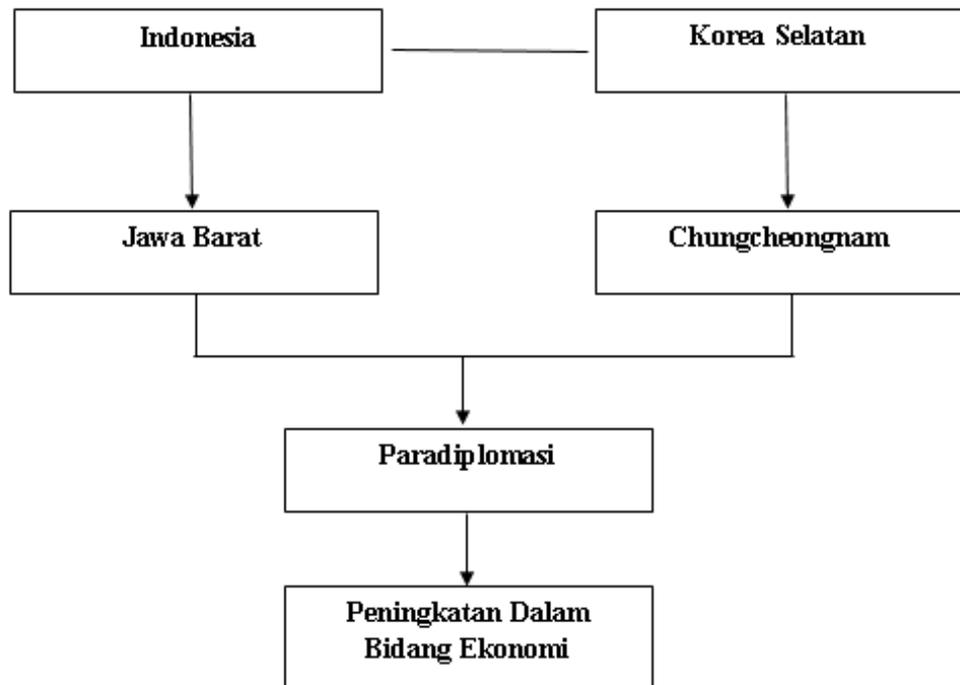
merupakan urat nadi perekonomian suatu Negara. Melalui perdagangan pula suatu Negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari mengenai interaksi lintas negara. Pada perkembangannya, interaksi dalam hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja, melainkan setiap individu juga dapat terlibat dalam interaksi tersebut karena memainkan peran penting dalam hubungan internasional.

Menurut penulis, teori paradiplomasi memiliki peran penting dalam mendukung praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Konsep ini memungkinkan penulis untuk menganalisis peran pemerintah daerah sebagai aktor non-negara yang dapat secara langsung berpartisipasi dalam kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam kerangka konsep yang telah direncanakan, peneliti akan menjelaskan bahwa Paradiplomasi sebagai salah satu bentuk diplomasi yang melibatkan aktor pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain, terutama dalam bidang ekonomi, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan.

Sehingga dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis terkait Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan dalam Bidang Ekonomi.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran